**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

**Masro’atin Dwi Malviqi**

**dwimalviqimasroatin@gmail.com**

**Hendy Widiastoeti**

**hwidiastoeti@gmail.com**

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitaas 17 Agustus 1945 Surabaya

***ABSTRACT***

***Presentation Of Regional Financial Statements Accordng To Government Regulation Number 71 Of 2010 Concerning Government Accounting Standards At The Surabaya City Revenue Office In 2019***

*Government accounting standards are accounting principles applied in compiling and presenting Government Financial Statements presented in PP No. 71 of 2010 on an accrual basis. The purpose of this study was to determine the presentation of the financial statements of the Surabaya City DPPKAD in the application of PP No. 71 of 2010. The method used in this study was descriptive. Data obtained through interviews with the head of the revenue division of the city of Surabaya. The results of this study are that the Surabaya City DPPKAD has not implemented PP No. 71 of 2010 but has complied with PP No. 24 of 2005.*

*The results of research conducted at the Surabaya City Government Financial Management Agency (BPKPD) have made the 2019 Regional Government Financial Report not in accordance with PP No. 21 of 2010. Constraints in the process of presenting the Surabaya city government's financial statements, especially understanding of human resources (HR) accounting staff Regarding government accounting, which still requires assistance, it turns out that it does not affect the time of the Surabaya City Government's financial reporting activities to the Supreme Audit Agency (BPK). This is anticipated by the many financial applications provided by BPKPD for SKPD which are useful in providing convenience and speed in the process of preparing SKPD financial reports.*

*Keywords: financial statements, government regulations, application analysis*

**ABSTRAK**

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan meyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang disajikan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian laporan keuangan DPPKAD Kota Surabaya dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala bagian pendapatan kota Surabaya. Hasil penelitian ini yaitu DPPKAD Kota Surabaya belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi teah sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan (BPKPD) Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 belum sesuai dengan PP No.21 Tahun 2010. Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan pemkot Surabaya terutama pemahaman sumber daya manusia ( SDM ) tenaga akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang masih memerlukan pendampingan, ternyata tidak mempengaruhi dalam kegiatan waktu pelaporan keuangan pemkot Surabaya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ). Hal ini diantisipasi dengan banyaknya aplikasi keuangan yang disediakan oleh BPKPD untuk SKPD yang bermanfaat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD.

***Kata kunci*** : *laporan keuangan,peraturan pemerintah,analisis penerapan*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara,pentingnya dilakukan perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dalam rangka menciptakan tata Kelola yang baik (*good governance )*,pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Standar akuntansi pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran,laporan perubahan saldo,laporan operasional,laporan arus kas ,laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laopran keungan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamankan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independent yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah otonomi Kabupaten/ kota maupun provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan,sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.

Penerapan otonomi daerah yang dilandasi oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan derah da undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Konsep otonomi daerah sangat identik dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja daerah. Hal ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat atas wewenang yang diberikan negara kepada daerah.

Salah satu unsur kinerja daerah yang harus dipertanggungjawabkan adalah kinerja keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen public yang harus dipublikaskan karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya. Pemerintaah dituntuk untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran adalah berupa laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ?

**LANDASAN TEORI**

1. **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan baik akuntansi pada umumnya ada 2 yaitu basis kas dan basis akrual. Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui Ketika kas di terima oleh kas pemerintah atau dibayarkan oleh kas pemerintah. Sedangkan las berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainya diakui,dicatat,dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi .

1. **Kompetensi**

Menurut Moeheriono (2009) kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir,bersikap,dan bertindak secara menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Kompetensi berdasarkan peraturan pemerintah republic Indonesia Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 100 tahun 2000 adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang PNS berupa pengetahuan,ketrampilan dan atau sikap perilaku yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas jabatanya.

1. **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengaan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah ,dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uangn termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan bahwa pula pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib,taat pada peraturan perundang-undangan ,efektif,efisien,ekonomis ,transparan dan bertanggung Jawab dengan memperhatikan asa keadilan,kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

1. **Pengengambangan Teori Akuntansi**

Pengembangan teori akuntansi sangat bergantung pada pengertian atau pendefinisian akuntasi sebagai suatu bidang pengetahuan. Tidak ada definisi tunggal yang dapat menjelaskan pengertian akuntansi. Trdapat banyak definisi yang diajukan oleh para ahli atau buku teks tentang pengertian akuntansi (Suwardjono,2005).

*American accounting association ( AAA)* tahun 1966, dalam publikasinya “*A Statement Of Basic Accounting Theory “ (*ASOBAT) mendefinisikan “ teori “ sebagai suatu rangkaian hipotesis, konseptual, dan prinsip-prinsip pragmatic yang membentuk suatu rerangka acuan umum untuk suatu bidang studi.

**METODE PENELITIAN**

1. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder . jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk narasi.

**Pembahasan**

### **Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot Surabaya**

Proses penyusuana laporan keungan pemkot Surabaya dilakukan secara bertahap setiap 3 bulan sekali,masing-masing satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) melakukan rekonsiliasi dengan pemkot Surabaya. Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan meliputi Laporan Realisasi Aanggaran,Laporan Operasional,Laporan perubahan Ekuitas,Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rekonsiliasi ini sebagai alat control dari pemkot Surabaya ke masing-masing SKPD dan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahunan yang diserahkan ke BPK. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemkot Surabaya ,disebut juga sebagai laporan keuangan konsolidasi. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan staf di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintahan Kota (pemkot) Surabaya, yang mengatakan : “…dari laporan keuangan masing-masing SKPD kita Menyusun laporan keungan tahunan,jadi kita mengkompilasi laporan keuangan dai SKPD menjadi laporan keuangan PEMKOT. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan rekonsiliasi,yang meliputi Laporan Realisasi Angaran dan Laporan Operasional ( akrualnya itu ). Mulai efektif mulai tahun 2016,berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK tahun 2015, badan pengelola keuangan kota Surabaya ini , direkomendasikan oleh BPK untuk Menyusun aplikasi tentang admismistrasi persediaan. Jadi sekarang ini, rekonsiliasi yang dilakukan pemkot plus rekonsiliasi persediaan. Rekonsiliasi persediaan ini bermanfaat untuk penyusunan bahan neraca pemkot untuk akhir tahun. Selama ini SKPD-SKPD hanya memberikan ke kami bahan neraca yang isinya meliputi piutang nya berapa,hutangnya berapa,persedianya berapa,dsb”.

### **Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya**

Penyajian Laporan Keuangan pemkot Surabaya telah menggunakan berbagai aplikasi keangan. Seperti aplikasi *e-accounting* untuk akuntansi , *e-inventory* untuk persediaan*, e-simbada* untuk barang ( asset). Berikut petikan wawancara peneliti dengan Kepala Sub Dit Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

“Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan, kita sudah basis WEB,kita sudah punya aplikasi e accounting untuk akuntansi, e inventory untuk persediaan,e simbada untuk barang. Penyajian laporan keuangan di e accounting ada berbasi akrual dan basis cash. Yang cash basis seperti Laporan Realisasi Anggaran , kita bantu Satuan Perangkat Kerja Daerah ( SKPD), angka kita bisa online, jadi SKPD tidak perlu double input. Tapi untuk basis akrual, otomatis itu mengandalkan skill akuntansi. Disini subdit akuntansi, mensupervisi, kita mendampingi, membimbing,SKPD untuk penjurnalan dari Laporan Operasional*.*

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah Surabaya tahun 2019 belum sesuai dengan SAP dengan PP No.71 Tahun 2010, tetapi pemerintah kota Surabaya telah siap menerapkan SAP dalam PP No.71 Tahun 2010 pada tahun anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan pemkot Surabaya menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap 7 Laporan Keuangan, yaitu Neraca,LRA,LAK, Laporan Perubahan SAL,Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan.

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan** 
   * + 1. Pemerintah kota Surabaya Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
       2. Kendala dalam proses penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya terutama lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi sektor publik.
       3. Penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Kota Surabaya tahun 2019 belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tetapi telah berpedoman pada PP Nomor 24 Tahun 2005 karena telah menggunakan aplikasi SIMDA dimana sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005.
       4. Penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 karena ekuitas yang disajikan belum sesuai dengan PSAP Nomor 1 ayat 84 PP Nomor 71 Tahun 2010 karena penyajianya masih terbagi menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan yang sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005. Namun untuk penyajianya aset dan kewajiban telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010
2. **Saran**

Untuk menerapkan PP No.71 Tahun 2010 Pemkot Surabaya perlu mengkaji ulang laporan keuangan agar menjadi efektif.

Kiranya untuk anggaran berikutnya, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya harusnya sudah menerapkan PP No.71 tahun 2010 sejak disahkanya peraturan baru.

Untuk dapat menghsilkan laporan keuangan yang lebih baik dan berkualitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebaiknya Pemkot Surabaya mengadakan pelatihan bagi pegawai khususnya dibagian keuangaan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyajian laporan keuangan dan dapat menggunakan aplikasi SIMDA dengan versi terbaru yang sistem pencatatanya masih berbasis kas menuju akrual sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010

**DAFTAR PUSTAKA**

*Anggawirya, Erhans,* 2000. **Sistem Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi**

**Indonesia** **Edisi Pertama.** Jakarta : PT.Ercontara Rajawali.

*Annisarahm,* 2008. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.**

Salemba Empat.

*Ahmad Yani ,*2008***,*Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia**.: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

*Ciclia,v.s Endah*. 2012**. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa .Skripsi**. Universitas Sam Ratulangi Manado

*Darise,Nurlan.*2009**. Akuntansi Keuangan Daerah ( Akuntansi Sektor Publik )** Pt.Indeks.Jakarta

*Halim,Abdul.*2013. **Akuntansi Keuangan Daerah.Edisi Keempat.Salemba Empat**.Jakarta

*Indiantoro .Nur dan Bambang Supomo.*1999. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen Yogyakarta:** BPFE Yogyakarta

*Mardiasmo,*2009.**Akuntansi Sektor Publik.Andi**.Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 **TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2012 **Tentang Perubahan Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 **Tentang Standar Akuntansi Pemerintah**. Jakarta